

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Implementasi Kota Layak Anak di Kota Semarang

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan melalui wawancara yang berhubungan dengan implementasi Kota Layak Anak di Kota Semarang, dari hasil penelitian maka penulis menarik kesimpulan implementasi Kota Layak Anak di Kota Semarang dapat dikatakan sudah cukup optimal karena pada indikator implementasi kebijakan seperti pembentukan lembaga/unit khusus, koordinasi dan kerjasama antar lembaga, sistem informasi dan data, partisipasi anak dan masyarakat, monitoring dan evaluasi sudah mencapai hasil yang baik, sedangkan hanya indikator sumber daya manusia yang kompeten dan penyediaan anggaran dan sumber daya yang memadai masih belum mencapai hasil yang baik.

Indikator pembentukan lembaga/unit khusus telah berjalan dengan baik melalui pembentukan gugus tugas yang melibatkan berbagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Gugus tugas ini memainkan peran penting dalam memastikan pemenuhan hak-hak anak, terutama melalui penyediaan fasilitas ramah anak dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Peran UPTD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 70 dan dukungan dari DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) sangat signifikan dalam melaksanakan program ini. DP3A, dengan acuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023, bertanggung jawab memberikan arahan dalam

pemenuhan hak anak. Forum Anak Kota Semarang juga berkolaborasi dengan DP3A sebagai mentor dalam menciptakan lingkungan ramah anak. Meskipun pembagian tugas antara Forum Anak dan DP3A tidak selalu spesifik, kerjasama mereka berhasil mendukung keberhasilan program KLA. Secara keseluruhan, struktur pelaksanaan dan pembagian tanggung jawab antara berbagai pihak dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Semarang dinilai sudah optimal.

Indikator koordinasi dan kerjasama antar lembaga telah berjalan dengan baik karena pelaksanaan program Kota Layak Anak (KLA) di Kota Semarang didorong oleh pertemuan rutin gugus tugas yang diadakan dua hingga tiga kali per tahun. Pertemuan ini berfungsi untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dan mengevaluasi pencapaian program. Koordinasi lintas dinas dan lembaga, seperti antara DP3A dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim), serta dukungan dari Yayasan Kesejahteraan Keluarga Semarang (YKKS), menjadi kunci sukses dalam pemenuhan hak anak, termasuk dalam penyediaan fasilitas ramah anak. Kolaborasi yang kuat dan efektif ini telah membawa Kota Semarang mencapai tahap "UTAMA" dalam evaluasi KLA dari pemerintah pusat. Selain itu, rapat koordinasi yang melibatkan berbagai elemen, seperti Forum Anak dan LSM, semakin memperkuat sinergi dalam mewujudkan Kota Layak Anak. Secara keseluruhan, kesuksesan KLA di Kota Semarang didasarkan pada evaluasi rutin, koordinasi yang efektif, serta kerjasama antar berbagai pihak yang memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan.

Indikator sistem informasi dan data telah terlaksana dengan baik karena pelaksanaan penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Semarang telah

didukung oleh sistem yang terintegrasi dan berlapis, mulai dari tingkat kelurahan hingga kota. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) bertanggung jawab menangani kasus kekerasan di tingkat kota, sementara Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK) di setiap kecamatan dan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) di tingkat kelurahan memainkan peran penting dalam mengumpulkan data dan mencegah kasus kekerasan. Dengan menggunakan aplikasi berbasis telepon genggam, data kasus kekerasan dapat diperbarui secara real-time, memungkinkan penanganan yang cepat dan akurat. Masyarakat Kota Semarang juga semakin aktif melaporkan kasus, yang menyebabkan peningkatan jumlah laporan. Namun, peningkatan ini justru mencerminkan kemampuan sistem dalam menangani kasus dengan baik dan tepat waktu. Melalui koordinasi yang efektif antara JPPA, PPTK, dan UPTD, didukung oleh teknologi yang responsif, proses pengumpulan data berjalan secara komprehensif, memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang kondisi kekerasan terhadap anak di Kota Semarang. Keseluruhan mekanisme ini memperkuat pelaksanaan program Kota Layak Anak di kota tersebut.

Indikator monitoring dan evaluasi telah terlaksana dengan baik karena Kota Semarang menerapkan pendekatan evaluasi yang inovatif dalam program Kota Layak Anak (KLA), termasuk dengan menyelenggarakan lomba sebagai salah satu metode untuk menilai penerapan indikator-indikator KLA di tingkat kelurahan. Lomba ini tidak hanya menjadi alat pemantauan, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi, memastikan bahwa standar KLA dipahami dan diterapkan secara menyeluruh. Monitoring terhadap pelaksanaan

KLA dilakukan melalui gugus tugas yang terhubung dari tingkat kelurahan hingga kota, dengan evaluasi tahunan terhadap komponen-komponen Kelurahan Layak Anak. Kelurahan yang berhasil memenuhi standar KLA diberikan penghargaan, yang berfungsi sebagai motivasi untuk terus berkomitmen dalam melaksanakan program. Selain itu, pertemuan formal dan informal antara walikota, gugus tugas KLA, dan grup operator KLA memperkuat koordinasi dan komunikasi. Secara keseluruhan, metode evaluasi melalui lomba, sistem monitoring terintegrasi, dan pemberian penghargaan membantu menjaga program KLA di Kota Semarang tetap efektif dan terus berkembang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Indikator partisipasi anak dan masyarakat belum terlaksana dengan baik karena sosialisasi yang rutin dilakukan oleh DP3A melibatkan Forum Anak Kota Semarang (FASE), telah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya program KLA. Namun, pelaksanaan program ini masih memiliki beberapa kekurangan, terutama dalam penyampaian informasi yang substansial mengenai isu-isu kritis, seperti kekerasan terhadap anak. Fokus sosialisasi yang lebih mengarah pada aspek administratif dan simbolis mengindikasikan bahwa perlindungan anak dari risiko kekerasan dan eksploitasi belum menjadi perhatian utama.

Kendati program ini berhasil membangun struktur pendukung di tingkat kelurahan dan meningkatkan kesadaran masyarakat, masih diperlukan pendekatan yang lebih strategis dan komprehensif untuk memastikan bahwa KLA tidak hanya menjadi formalitas, tetapi juga solusi nyata terhadap tantangan utama perlindungan anak. Dengan demikian, meskipun terdapat kemajuan yang berarti,

perhatian lebih terhadap isu-isu perlindungan anak yang substantif harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan program KLA di Kota Semarang.

Indikator sumber daya manusia yang kompeten belum terlaksana dengan baik karena meskipun pelatihan telah dianggarkan setiap tahun, keterbatasan anggaran dan regenerasi SDM menjadi tantangan utama. Kendala ini muncul terutama ketika tenaga terlatih berpindah tugas ke unit lain, yang membutuhkan pelatihan ulang bagi SDM baru. Selain itu, keterlibatan Yayasan Kesejahteraan Keluarga Semarang (YKKS) dalam pendampingan lapangan memperkuat implementasi program KLA. Secara keseluruhan, meskipun pelatihan dan pendampingan berjalan dengan baik dan telah meningkatkan kesadaran akan hak-hak anak, tantangan terkait regenerasi SDM dan ketersediaan anggaran perlu ditangani agar program ini dapat terus berkembang secara optimal.

Indikator penyediaan anggaran dan sumber daya yang memadai belum terlaksana dengan baik terkait sinkronisasi dan standar pelaksanaan di lapangan. Meskipun anggaran tidak menjadi kendala utama, kurangnya koordinasi yang efektif antara dinas menyebabkan beberapa fasilitas, seperti taman ramah anak, tidak selalu sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dukungan anggaran tersedia, kualitas implementasi di lapangan masih perlu ditingkatkan agar program KLA dapat berjalan lebih optimal dan memenuhi target yang diharapkan.

Secara garis besar implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Semarang belum sepenuhnya dapat dikatakan berhasil walaupun banyak indikator yang berjalan optimal. Hal tersebut karena dalam pelaksanaannya masih terdapat

beberapa permasalahan dari indikator implementasi yang sudah ada, sehingga menyebabkan implementasi kebijakan Kota Layak Anak masih belum berhasil sepenuhnya.

4.1.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Kota Layak Anak

Implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Semarang dapat dikatakan belum sempurna karena berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada indikator faktor pendorong dan penghambat implementasi seperti komunikasi, sumber daya, dan disposisi sudah mencapai hasil yang baik, sedangkan yang belum tercapai adalah indikator struktur birokrasi.

Indikator sumber daya dikatakan sebagai faktor pendorong implementasi Kota Layak Anak karena Kota Semarang mengalokasikan anggaran khusus untuk pemenuhan hak anak, yang dialokasikan berdasarkan bidang dan tupoksi masing-masing lembaga. Meskipun anggaran ini fluktuatif, terdapat peningkatan dari tahun ke tahun, dan setiap lembaga seperti Disperkim dan Disdukcapil mendapatkan anggaran sesuai dengan tanggung jawab mereka, seperti pembangunan taman layak anak dan penerbitan akta lahir. Kerjasama yang baik antara dinas-dinas terkait memastikan bahwa anggaran yang tersedia cukup untuk mendukung pelaksanaan program Kota Layak Anak (KLA). Dengan anggaran yang dikelola sesuai tupoksi dan koordinasi antar lembaga, Kota Semarang berusaha memastikan bahwa program KLA dapat berjalan efektif dan mencapai tujuannya.

Indikator disposisi dikatakan sebagai faktor pendorong implementasi Kota Layak Anak karena DP3A Kota Semarang menunjukkan komitmen tinggi dalam

implementasi program Kota Layak Anak (KLA), berhasil meraih status "utama" dalam penilaian KLA dari kementerian. Kota ini terus berusaha memenuhi indikator yang ditetapkan untuk mempertahankan dan meningkatkan status tersebut. Sebagai fasilitator dan pelapor, Kota Semarang aktif terlibat dalam kegiatan yang mendukung KLA dan berperan sebagai penyalur aspirasi anak kepada pemerintah. Dengan dedikasi yang kuat dari DP3A, Kota Semarang tidak hanya berkomitmen untuk mempertahankan status tinggi yang telah dicapai, tetapi juga terus mendukung kebijakan dan kegiatan yang memajukan kesejahteraan anak.

Indikator struktur birokrasi dikatakan sebagai faktor penghambat implementasi Kota Layak Anak karena dalam proses penilaian Kota Layak Anak memerlukan waktu lama, Kota Semarang harus menunggu giliran untuk penilaian oleh kementerian. Koordinasi dengan lembaga lain dalam implementasi Kota Layak Anak juga menjadi hambatan dalam pelaksanaannya karena ada beberapa kasus pembangunan untuk pelaksanaan Kota Layak Anak tidak memenuhi standarisasi yang diberikan oleh DP3A Kota Semarang.

Indikator komunikasi dikatakan sebagai penghambat implementasi Kota Layak Anak karena adanya kelemahan utama yang teridentifikasi yaitu kurangnya pembahasan mengenai data kekerasan terhadap anak dalam sosialisasi yang dilakukan. Fokus sosialisasi cenderung pada pengenalan program, tujuan, dan langkah-langkah implementasi KLA, tanpa memberikan gambaran statistik atau fakta mengenai angka kekerasan terhadap anak yang menjadi tantangan faktual di Kota Semarang. Ketiadaan informasi ini menimbulkan beberapa konsekuensi:

yaitu kurangnya kesadaran masyarakat. Masyarakat tidak memperoleh pemahaman yang utuh tentang urgensi program KLA, terutama terkait masalah kekerasan terhadap anak yang seharusnya menjadi perhatian utama. Data kekerasan terhadap anak yang tidak diungkapkan dalam sosialisasi mengurangi kesempatan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memahami skala masalah dan berkontribusi dalam upaya pencegahan serta penanganan.

4.2 Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Semarang, maka saran yang dapat penulis berikan dalam meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan Kota Layak Anak yang pertama ialah DP3A perlu memastikan bahwa sosialisasi program KLA tidak hanya fokus pada aspek administratif, tetapi juga mencakup informasi substantif, terutama terkait isu-isu kritis seperti kekerasan dan eksploitasi anak. Penyampaian informasi ini dapat dilakukan melalui pelatihan atau forum diskusi yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk masyarakat dan Forum Anak. Kedua, Evaluasi program KLA dapat diperluas dengan melibatkan pihak ketiga, seperti akademisi atau lembaga independen, untuk memberikan penilaian objektif. Selain itu, indikator keberhasilan harus diperluas untuk mencakup aspek substansial, seperti penurunan angka kekerasan terhadap anak. Ketiga, Mengatasi tantangan regenerasi SDM dengan memperkuat mekanisme pelatihan berkelanjutan yang dapat diakses oleh tenaga baru. Selain itu, diperlukan sistem insentif untuk menjaga komitmen SDM yang telah dilatih agar tetap berada dalam program KLA.

Keempat, DP3A bersama instansi terkait perlu meningkatkan koordinasi dalam penggunaan anggaran agar fasilitas yang dibangun, seperti taman ramah anak, dapat memenuhi standar yang ditetapkan. Monitoring dan evaluasi rutin terkait kualitas implementasi anggaran juga perlu ditingkatkan.

2. Berdasarkan hasil penelitian tentang faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Semarang maka saran yang dapat peneliti berikan yaitu pertama, Diperlukan Pengawasan yang lebih ketat terhadap implementasi proyek-proyek, seperti pembangunan taman ramah anak, dapat membantu memastikan bahwa semua fasilitas yang dibangun memenuhi standar yang ditetapkan. Kedua, dalam setiap sesi sosialisasi KLA, penting bagi DP3A untuk menyertakan data atau fakta terkini mengenai angka kekerasan terhadap anak. Pemaparan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai tantangan nyata yang dihadapi anak-anak di Kota Semarang.